

Kapitalisme dan Ketidakadilan Global: Kajian Pemikiran Ellen Meiksins Wood dalam Ekonomi Islam

Iqbal Faza¹, Fathul Mufid²

¹² Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

* E-mail: iqbalfaza83@gmail.com, fathulmufid@iainkudus.ac.id

* corresponding author

Kata Kunci

Kapitalisme, Ellen Meiksins Wood, Ketidakadilan Global, Ekonomi Islam, Keberlanjutan

Abstrak

Artikel ini membahas relevansi kritik Ellen Meiksins Wood terhadap kapitalisme dalam konteks ekonomi Islam, dengan fokus pada isu ketidakadilan global dan keberlanjutan. Pemikiran Wood, yang menekankan sifat eksploitatif kapitalisme dan dampaknya terhadap demokrasi ekonomi, dikaji untuk memahami akar permasalahan ketimpangan global. Dalam ekonomi Islam, prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, dan distribusi kekayaan menjadi tawaran solutif untuk tantangan kapitalisme modern. Artikel ini menganalisis bagaimana pendekatan Islam dapat merealisasikan model ekonomi yang lebih inklusif dan etis, sekaligus memperkuat keberlanjutan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan qard al-hasan. Melalui metodologi kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini menunjukkan bahwa integrasi antara kritik Wood dan kerangka ekonomi Islam dapat menjadi landasan untuk merancang sistem ekonomi alternatif yang menanggulangi ketidakadilan global. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan wacana keberlanjutan dalam ekonomi Islam.

Keywords

Capitalism, Ellen Meiksins Wood, Global Injustice, Islamic Economics, and Sustainability

Abstract

This article explores the relevance of Ellen Meiksins Wood's critique of capitalism within the framework of Islamic economics, focusing on issues of global injustice and sustainability. Wood's analysis, which highlights the exploitative nature of capitalism and its effects on economic democracy, is examined to uncover the root causes of global inequality. In Islamic economics, the principles of social justice, sustainability, and wealth distribution provide potential solutions to the challenges posed by modern capitalism. This article analyzes how the Islamic approach can foster a more inclusive and ethical economic model while enhancing sustainability through mechanisms such as zakat, waqf, and qard al-hasan. Utilizing a qualitative methodology grounded in a literature review, this article demonstrates that the integration of Wood's critique with the Islamic economic framework can serve as a foundation for designing an alternative economic system that addresses global injustice. The findings are anticipated to contribute both theoretically and practically to the discourse on sustainability in Islamic economics.

Pendahuluan

Kapitalisme global, sebagai sistem ekonomi dominan, ditandai oleh akumulasi modal yang tidak terdistribusi secara merata dan eksploitasi sumber daya alam secara masif. Sistem ini memprioritaskan keuntungan pribadi daripada kebutuhan kolektif, yang menyebabkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan krisis keberlanjutan. Kapitalisme global juga memperparah ketidakadilan sosial melalui ketimpangan pendapatan, dimana data menunjukkan bahwa 1% populasi dunia menguasai lebih dari 60% kekayaan global, sementara miliaran orang hidup di bawah garis kemiskinan (Annie Thériault, 2023). Fenomena ini menunjukkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, yang seringkali dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politik yang menguntungkan segelintir elit. (Arfah & Arif, 2022) Praktek eksploitasi tenaga kerja juga semakin memperburuk ketidakadilan sosial. Hal ini terlihat dengan fenomena banyaknya perusahaan multinasional memindahkan pabrik ke negara-negara berkembang untuk memanfaatkan upah rendah, seringkali tanpa memberikan hak-hak dasar pekerja (Arfah & Arif, 2022).

Ini mempertegas pola hubungan ekonomi yang eksploitatif. Selain itu, praktik investasi besar-besaran dalam industri ekstraktif sering menggusur komunitas lokal tanpa kompensasi yang layak, yang menyebabkan kemiskinan struktural di wilayah tersebut. Kapitalisme global juga mendorong konsumerisme tanpa batas, yang berdampak serius pada keberlanjutan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan industri menyebabkan deforestasi, polusi, dan perubahan iklim. Laporan Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa kapitalisme mendorong emisi karbon yang merusak lingkungan (HS, 2019). Pola pertanian industri yang berbasis keuntungan telah mengurangi ketahanan pangan global, sementara banyak negara menghadapi krisis air bersih karena privatisasi sumber daya (Arfah & Arif, 2022).

Ekonomi Islam menawarkan alternatif melalui prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan (Fasya, 2021). Instrumen seperti zakat, wakaf, dan qard hasan bertujuan untuk redistribusi kekayaan dan mendukung ekonomi berbasis kebutuhan, bukan keuntungan. Hal ini relevan dalam menghadapi tantangan ketidakadilan sosial dan krisis keberlanjutan yang dihasilkan oleh kapitalisme.

Integrasi pemikiran kritis seperti yang dikembangkan Ellen Meiksins Wood dengan ekonomi Islam dapat memperkuat solusi untuk mengatasi ketimpangan global dan kerusakan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya demokrasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip-prinsip etika Islam. Secara umum, kajian tentang kritik kapitalisme telah banyak dilakukan. Namun demikian terdapat beberapa hal penting yang perlu dibahas dan didiskusikan lebih lanjut, diantaranya tentang kurangnya integrasi eksplisit antara kritik Wood dengan ekonomi Islam. Sebagian besar studi ekonomi Islam memang membahas keadilan dan distribusi, tetapi jarang merujuk secara spesifik pada kritik teoritis Wood tentang kapitalisme modern—terutama pada aspek struktur kelas dan imperialisme kapitalis (Azizah et al., 1970).

Dengan latar belakang tersebut, maka pembahasan ini menjadi sangat relevan. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah pemikiran Wood mengenai kapitalisme dan ketidakadilan, serta implikasinya dalam konsep keberlanjutan ekonomi Islam. Selain

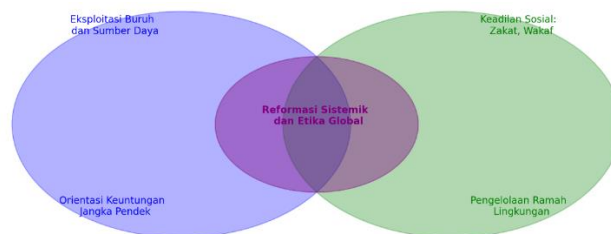
itu, juga akan mencoba memetakan keselarasan dan ketegangan antara kritik Wood dan prinsip ekonomi Islam. Dengan menggabungkan analisis kritis Wood dan pendekatan sistem ekonomi Islam, artikel ini diharapkan dapat menjembatani gap teoritis dan menawarkan kontribusi positif baik dari segi akademik maupun kebijakan, untuk sistem ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Metode

1. **Pendekatan Penelitian:** Deskriptif-kualitatif atau analisis kritis terhadap konsep kapitalisme dan keberlanjutan. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap teks, dokumen, dan literatur akademik. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, termasuk:
 - Tulisan dan kritik Ellen Meiksins Wood tentang kapitalisme.
 - Literatur ekonomi Islam yang membahas keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan.
 - Studi-studi sekunder tentang ketidakadilan global dan keberlanjutan dari jurnal, buku, dan laporan internasional.

Analisis dilakukan dengan membandingkan prinsip kapitalisme yang digambarkan oleh Wood dengan pendekatan ekonomi Islam, yang menawarkan alternatif berbasis nilai-nilai moral dan etika.

2. **Sumber Data:** Kajian literatur dari tulisan Wood, literatur ekonomi Islam, serta data sekunder dari studi-studi terkait ketidakadilan global dan keberlanjutan.
3. **Kerangka Analisis:**



Gambar di atas adalah visualisasi kerangka analisis yang menghubungkan kritik kapitalisme Ellen Meiksins Wood dengan prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam. Berikut penjelasannya:

1. **Lingkar Biru (Kritik Kapitalisme):** Menggambarkan ciri utama kapitalisme yang dikritik oleh Wood, seperti eksploitasi buruh dan sumber daya serta orientasi keuntungan jangka pendek.
2. **Lingkar Hijau (Keberlanjutan Islam):** Menunjukkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
3. **Irisan Ungu (Integrasi):** Mewakili area solusi di mana prinsip keberlanjutan Islam dapat menawarkan reformasi sistemik sebagai respons terhadap kritik kapitalisme, termasuk pendekatan etika global.

Hasil dan Pembahasan

Kritik Wood terhadap Kapitalisme dan Dampaknya pada Ketidakadilan Global.

Ellen Meiksins Wood mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang menciptakan ketidakadilan sosial, eksploitasi tenaga kerja, dan degradasi lingkungan, serta berkontribusi pada ketimpangan global (Brabec, 2016). Beberapa kritik utamanya mencakup beberapa aspek berikut:

Ekspansi Logika Ekonomi ke Seluruh Aspek Kehidupan.

Kapitalisme mendorong perluasan logika ekonomi ke berbagai aspek kehidupan karena berpusat pada akumulasi modal dan keuntungan. Dalam sistem ini, setiap tindakan dan hubungan cenderung dinilai berdasarkan potensi ekonomi dan dampaknya terhadap keuntungan. Hal ini menciptakan kecenderungan untuk mengkomodifikasi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, bahkan hubungan sosial, yang seharusnya tidak murni berorientasi pada keuntungan. Kapitalisme didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Dalam konteks ini, setiap kegiatan ekonomi, termasuk yang sebelumnya tidak dianggap sebagai komoditas, bisa menjadi sarana untuk mencari keuntungan. Wood menyoroti bahwa kapitalisme memiliki kemampuan unik untuk memisahkan hubungan ekonomi dari politik dan sosial. Dalam kapitalisme, hubungan produksi diatur oleh kekuatan pasar, bukan oleh kebutuhan sosial. Hal ini menciptakan struktur yang memprioritaskan akumulasi keuntungan dibandingkan kesejahteraan manusia atau keberlanjutan lingkungan (Ellen Meiksins Wood, 1981).

Ketimpangan Global.

Kapitalisme, dengan sistemnya yang berorientasi pada keuntungan dan akumulasi modal, seringkali dikaitkan dengan peningkatan ketimpangan global. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, eksploitasi sumber daya alam, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang ekonomi. Kapitalisme global, menurut Wood, tidak hanya melibatkan persaingan antar perusahaan tetapi juga antar negara. Hal ini memperburuk ketimpangan global karena negara-negara berkembang sering kali diposisikan sebagai pemasok bahan mentah atau tenaga kerja murah untuk negara-negara maju. Ketimpangan ini diperkuat oleh kebijakan ekonomi global yang dirancang untuk melayani kepentingan modal trans-nasional (Robinson, 2007). Dalam kapitalisme, mereka yang memiliki modal cenderung mendapatkan keuntungan lebih besar, sementara yang lain sulit mengejar. Ini menciptakan siklus di mana kekayaan dan kekuasaan semakin terkonsentrasi di tangan segelintir orang.

Krisis Ekologi.

Kapitalisme sering mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi

manfaat dari sumber daya tersebut. Logika akumulasi kapitalisme berkontribusi pada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, yang mengarah pada kerusakan ekosistem dan krisis lingkungan global. Sistem ini tidak memiliki mekanisme internal untuk menghentikan eksploitasi sumber daya hingga melebihi batas ekologis (Robinson, 2007).

Eksplorasi Tenaga Kerja.

Kapitalisme didasarkan pada eksploitasi tenaga kerja, di mana surplus nilai yang dihasilkan pekerja disita oleh pemilik modal. Ini menciptakan kesenjangan kekayaan yang ekstrem antara pemilik modal dan kelas pekerja (Robinson, 2007). Kapitalisme, dengan fokus pada akumulasi modal dan keuntungan, seringkali mengarah pada eksploitasi tenaga kerja karena adanya dorongan untuk memaksimalkan produksi dan meminimalkan biaya, termasuk upah pekerja. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara pemilik modal dan pekerja, di mana pekerja rentan dieksploitasi karena kebutuhan mereka untuk mendapatkan penghasilan. Wood mengajak kita untuk melihat eksploitasi tenaga kerja dalam kapitalisme bukan hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai masalah politik dan sosial yang mendalam, yang terkait dengan paksaan dan struktur kekuasaan

Kritik ini relevan dalam konteks ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan sosial dan keberlanjutan. Prinsip Islam, seperti larangan riba, eksploitasi, dan ketimpangan ekonomi, serta konsep maqasid syariah, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penekanan pada zakat, sedekah, dan wakaf mencerminkan komitmen untuk redistribusi kekayaan secara adil dan pengelolaan sumber daya yang bijak.

Keberlanjutan dalam Ekonomi Islam sebagai Alternatif terhadap Sistem Kapitalis.

Prinsip keberlanjutan dalam ekonomi Islam menawarkan alternatif yang kuat terhadap kapitalisme, khususnya dalam menghadapi masalah ketidakadilan sosial, eksploitasi tenaga kerja, dan krisis lingkungan sebagaimana dikritik oleh Ellen Meiksins Wood. Sistem ekonomi Islam, dengan landasan Al-Qur'an, Hadis, dan maqasid syariah, memiliki pendekatan holistik untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, sosial, dan ekologis.

1. Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan yang Merata.

Ekonomi Islam memprioritaskan distribusi kekayaan secara adil melalui instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Prinsip ini berakar pada perintah Al-Qur'an:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah: 103).

Instrumen zakat dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menciptakan redistribusi kekayaan, dan memberdayakan kelompok miskin.

1. Pengelolaan Sumber Daya secara Bijak dan Berkelanjutan.

Ekonomi Islam mengajarkan pemanfaatan sumber daya secara adil tanpa eksploitasi berlebihan:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya...” (QS. Al-A'raf: 56).

Hadis Nabi juga memperingatkan tentang larangan pemborosan: *“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Larangan Eksploitasi dan Riba.

Kapitalisme yang didasarkan pada riba dan akumulasi modal tanpa batas dianggap merusak. Ekonomi Islam melarang riba untuk mencegah ketidakadilan ekonomi:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275). Larangan ini menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan etis.

3. Keberlanjutan Lingkungan

Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem: *“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi...”* (QS. Al-An'am: 165). Konsep ini memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan.

4. Maqasid Syariah sebagai Kerangka Utama.

Secara harfiah **Maqashid syariah** berarti “tujuan-tujuan dari syariah.” Dalam konteks ekonomi Islam, maqashid syariah berperan sebagai landasan normatif dan kerangka etis dalam merumuskan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Ia menjadi pijakan utama yang membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi konvensional, karena menekankan pada keseimbangan antara tujuan material dan spiritual dalam kegiatan ekonomi. Imam al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* dan Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menyebut bahwa tujuan syariah bertumpu pada lima prinsip utama:

- **Hifzh al-din (Menjaga agama)**
- **Hifzh al-nafs (Menjaga jiwa)**
- **Hifzh al-'aql (Menjaga akal)**
- **Hifzh al-nasl (Menjaga keturunan)**
- **Hifzh al-mal (Menjaga harta)**

Dalam konteks ekonomi syariah, dua maqashid yang paling dominan adalah *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifzh al-nafs* (menjaga keberlangsungan hidup manusia). Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjamin keadilan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Sebagai contoh, pelarangan riba (bunga) dalam Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan distribusi kekayaan dan mencegah eksploitasi. Riba menyebabkan akumulasi kekayaan secara tidak adil, memperparah ketimpangan sosial, dan

mengancam stabilitas ekonomi. Dengan melarang riba, ekonomi syariah menegakkan *maqashid hifzh al-mal*, yaitu menjaga harta dari ketimpangan dan penindasan.

Begitu pula, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam skala sosial. Fungsi zakat mencerminkan *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mal*, karena bertujuan menciptakan kesejahteraan umat serta mencegah akumulasi harta di tangan segelintir orang, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hasyr: 7 “...agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Maqashid syariah juga mendasari pengembangan instrumen keuangan syariah, seperti akad mudharabah (kemitraan berbasis bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama usaha), yang menekankan pada pembagian risiko dan keadilan kontraktual. Dalam model ini, tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lain sebagaimana dalam sistem bunga konvensional. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi berada dalam kerangka etika dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks kontemporer, maqashid syariah juga relevan untuk menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan. Prinsip menjaga kehidupan (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*) bisa dikaitkan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi, sedangkan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) relevan dengan perlindungan lingkungan hidup untuk generasi masa depan.

Dengan demikian, maqashid syariah bukan hanya sekadar konsep abstrak, tetapi kerangka praktis dan strategis dalam perancangan sistem ekonomi Islam. Ia memberikan arah, batasan, dan nilai-nilai untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip ilahiah. Oleh karena itu, setiap kebijakan, produk, maupun sistem ekonomi dalam ekonomi Islam harus merujuk dan bertumpu pada maqashid syariah agar benar-benar mampu menghadirkan maslahat dan menghindarkan kerusakan (*mafsadat*) dalam kehidupan manusia.

Solusi Ekonomi Islam terhadap Masalah Kapitalisme

1) Mengatasi Ketimpangan Sosial.

Instrumen redistribusi seperti zakat langsung menargetkan masalah kesenjangan ekonomi yang diidentifikasi Wood. Dana zakat dapat digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat miskin, berbeda dengan kapitalisme yang mengandalkan trickle-down effect.

2) Mengurangi Eksploitasi Tenaga Kerja.

Prinsip keadilan dalam Islam melarang eksploitasi buruh. Hadis Nabi menyebutkan:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah). Hal ini menunjukkan tanggung jawab moral majikan terhadap pekerja.

3) Mengatasi Krisis Ekologi.

Kapitalisme sering kali mengabaikan batas-batas ekologis. Dalam Islam, setiap tindakan manusia diukur berdasarkan dampaknya terhadap keseimbangan

lingkungan, sehingga mendorong pengembangan ekonomi berbasis energi terbarukan dan ramah lingkungan.

4) Reformasi Sistem Keuangan.

Sistem ekonomi Islam mengedepankan profit and loss sharing (PLS), yang lebih stabil dibandingkan sistem kapitalisme berbasis bunga. Sistem ini mencegah spekulasi berlebihan yang sering memicu krisis ekonomi.

Implikasi Pemikiran Wood untuk Ekonomi Islam.

Ellen Meiksins Wood mengkritik kapitalisme sebagai sistem yang menstrukturkan ketidakadilan sosial dan lingkungan melalui eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Kritik ini membuka ruang refleksi untuk mengadopsi pendekatan alternatif yang mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ekonomi Islam, dengan prinsip dasarnya yang berorientasi pada keadilan, distribusi kekayaan yang adil, dan keberlanjutan, dapat mengintegrasikan beberapa kritik Wood sebagai bagian dari reformasi sistem ekonomi.

Melawan Eksploitasi melalui Larangan Riba dan Sistem Profit-Loss Sharing (PLS)

Wood menyoroti bahwa kapitalisme memungkinkan akumulasi kekayaan melalui eksploitasi buruh dan peminjam yang terjerat utang. Ekonomi Islam melarang riba (bunga) untuk mencegah ketidakadilan dalam transaksi keuangan (QS. Al-Baqarah: 275). Sebagai gantinya, sistem berbasis PLS menawarkan solusi dengan membagi risiko dan keuntungan secara adil, mendorong investasi produktif daripada spekulasi yang merugikan.

Redistribusi Kekayaan melalui Zakat dan Wakaf

Wood menyoroti ketimpangan sosial yang melekat dalam kapitalisme akibat dominasi modal dan marginalisasi kelas pekerja. Ekonomi Islam menjawabnya melalui redistribusi kekayaan dengan instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Zakat, misalnya, merupakan mekanisme langsung untuk membantu golongan miskin, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberdayakan ekonomi umat. Hal ini sejalan dengan QS. At-Taubah: 103 yang menekankan pentingnya zakat dalam membersihkan dan menyejahterakan masyarakat.

Keberlanjutan Lingkungan sebagai Khalifah di Bumi

Krisis lingkungan yang diidentifikasi Wood sebagai akibat eksploitasi kapitalis dapat diatasi dengan konsep Islam tentang manusia sebagai *khalifah* di bumi (QS. Al-An'am: 165). Islam memerintahkan manusia menjaga keseimbangan ekosistem dan melarang pemborosan (QS. Al-A'raf: 31). Dalam praktik, ekonomi Islam dapat mempromosikan investasi dalam energi terbarukan dan mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan.

Keadilan dalam Hubungan Produksi dan Konsumsi

Wood menekankan ketimpangan hubungan produksi dalam kapitalisme. Islam memberikan pedoman untuk keadilan dalam transaksi ekonomi melalui larangan manipulasi harga, monopoli, dan eksploitasi. Hal ini tercermin dalam hadits Nabi: *"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering"* (HR. Ibnu Majah). Prinsip ini dapat diterapkan dalam sistem ekonomi Islam untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan hubungan yang lebih adil antara pengusaha dan buruh.

Maqasid Syariah sebagai Kerangka Alternatif

Ekonomi Islam menggunakan *maqasid syariah* (tujuan syariah) sebagai panduan, mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini berfokus pada kesejahteraan kolektif dalam jangka panjang, berbeda dengan kapitalisme yang sering kali menekankan keuntungan jangka pendek. Maqasid syariah dapat menjadi kerangka untuk merancang kebijakan ekonomi yang mendukung inklusi sosial dan keberlanjutan ekologis.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan struktural untuk mengatasi masalah ketidakadilan sosial, eksploitasi, dan kerusakan lingkungan yang menjadi kritik utama Wood terhadap kapitalisme. Dengan landasan nilai-nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan, ekonomi Islam mampu berperan sebagai solusi alternatif yang tidak hanya relevan secara lokal tetapi juga dalam konteks global.

Kesesuaian dan Perbedaan Pandangan Wood dengan Ekonomi Islam.

Keselarasan Pandangan Wood dengan Prinsip Ekonomi Islam

Keadilan Sosial

Dalam kritiknya terhadap kapitalisme, Wood menekankan bahwa sistem ini menciptakan ketimpangan sosial yang sistemik melalui dominasi modal atas tenaga kerja dan eksploitasi buruh. Ia percaya bahwa sistem ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan kolektif.

Prinsip keadilan sosial menjadi inti ekonomi Islam, sebagaimana tercermin dalam instrumen seperti zakat dan larangan riba. Zakat mendukung redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada yang membutuhkan (QS. At-Taubah: 103), sementara larangan riba memastikan transaksi yang adil tanpa eksploitasi (QS. Al-Baqarah: 275).

Zakat wajib dalam Islam bukan hanya amal individu, melainkan instrumen struktural untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Baihaqi, 2024), zakat berperan sebagai *"sosial solidarity and collective responsibility for the common welfare"* dan mencerminkan keadilan distribusi yang universal (Saechu & Syifa, 2024) menemukan zakat turut *"meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat secara makro dan mikro,"* berdampak positif terhadap stabilitas dan inklusi ekonomi. Selain itu, zakat sebagai bagian dari Baitul Maal (semacam kas negara) sejak masa Khalifah Umar menunjukkan

implementasi redistribusi kekayaan untuk menjaga standar hidup seluruh masyarakat. Pelarangan riba dalam Islam juga mengandung hikmah yang sangat luas.

Praktek riba dianggap buruk karena dianggap merugikan, tidak adil, dan dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi. Riba juga dipandang sebagai bentuk eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan, serta dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Riba dianggap tidak adil dan eksploitatif karena membebani pihak yang membutuhkan dengan tambahan yang tidak wajar, sementara pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko yang sepadan. (Husni, 2020) menyebut bahwa riba sangat menguras keuangan seseorang. Sedangkan pemilik modal akan diuntungkan dalam kondisi apapun, bahkan dengan tanpa berkeringat.

Praktik riba juga dapat menghilangkan semangat saling membantu dan gotong royong dalam masyarakat, serta menumbuhkan sifat tamak dan keserakahan sehingga dapat merusak solidaritas sosial. Hal ini jika dibiarkan, akan dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkeadilan.

Dampak secara makro ekonomi, zakat mendistribusikan pendapatan dan memacu investasi serta konsumsi produktif. Sedangkan riba, sebaliknya menimbulkan ketimpangan dan inflasi karena menimbulkan akumulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. (Özek, 2025)

Distribusi Kekayaan

Dalam kritiknya, Wood mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata, mengkritik akumulasi kapital yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Baginya, struktur kapitalisme tidak hanya menciptakan ketimpangan, tetapi juga mengalienasi pekerja dari hasil produksinya (Fadillah et al., 2024).

Solusi ekonomi Islam atas *problem* distribusi kekayaan antara lain dengan mendorong distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, sistem berbasis *profit-loss sharing* (PLS) mencegah akumulasi kekayaan sepihak, mengutamakan keadilan dalam hasil usaha bersama. Islam melarang riba karena dianggap merugikan—menyebabkan transfer kekayaan dari miskin ke kaya tanpa kerja riil. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kato, 2022) (model Econophysics) menunjukkan bahwa sistem berbasis bunga meningkatkan ketimpangan lebih cepat. Sistem bagi hasil dan zakat, sifatnya lebih menahan disparitas (dengan melihat Gini index).

Keberlanjutan

Kapitalisme menurut Wood merusak lingkungan melalui eksploitasi sumber daya tanpa batas untuk mengejar keuntungan. Wood percaya bahwa keberlanjutan harus menjadi bagian integral dari sistem ekonomi.

Prinsip Islam menekankan manusia sebagai khalifah di bumi (QS. Al-An'am: 165), yang bertugas menjaga keseimbangan ekosistem. Dari konsep ini, jelas bahwa Islam

menempatkan manusia sebagai *khalifah* di bumi dengan tanggung jawab menjaga keberlanjutan ekologis. Prinsip *mizan* (keseimbangan) menegaskan bahwa manusia tidak boleh mengeksploitasi alam secara berlebihan dan harus menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan. Larangan pemborosan (QS. Al-Isra': 27) dan etika lingkungan dalam Islam mendukung model ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Ekonomi Islam menekankan bahwa tidak hanya halal, tetapi juga *thayyiban*: baik, murni, dan bermanfaat untuk manusia, masyarakat, dan lingkungan. Didalamnya terkandung nilai-nilai seperti: menolak pemborosan (*israf*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian (*gharar*), sehingga mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Perbedaan Pandangan Wood dengan Prinsip Ekonomi Islam

Dasar Filosofis

Wood dalam perspektifnya berdasarkan materialisme historis Marxian. Ia menyoroti dinamika kelas sebagai pendorong perubahan sosial dan ekonomi, dengan fokus pada kontrol atas alat produksi. Ekonomi Islam berbasis nilai-nilai transendental, ekonomi Islam menganggap bahwa harta adalah amanah dari Allah, dan penggunaannya harus sejalan dengan aturan syariah yang bertujuan untuk kesejahteraan umat.

Pendekatan terhadap Pasar

Wood melihat kapitalisme sebagai sistem pasar didorong oleh eksploitasi dan akumulasi modal, yang menurutnya mengalienasi buruh. Ia tidak menawarkan sistem pasar alternatif yang spesifik, tetapi menekankan perlunya kontrol sosial atas ekonomi.

Sedangkan menurut ekonomi Islam tidak menolak pasar, tetapi mengatur agar pasar berfungsi adil melalui larangan monopoli, penipuan, dan manipulasi harga. Islam mendukung aktivitas pasar yang berlandaskan prinsip moral dan keadilan.

Pendekatan terhadap Negara

Wood percaya bahwa negara kapitalis modern secara inheren mendukung kepentingan kelas penguasa, sehingga diperlukan transformasi radikal dalam struktur negara. Negara dalam pandangan Islam berfungsi sebagai fasilitator ekonomi yang adil, mengelola sumber daya untuk kepentingan bersama tanpa merusak prinsip syariah.

Kesimpulan

Pemikiran Wood dan ekonomi Islam sama-sama menentang ketimpangan sosial, eksploitasi, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kapitalisme. Namun, perbedaan mendasar terletak pada dasar filosofis dan solusi yang ditawarkan. Wood mengusulkan perubahan struktural berbasis materialisme historis, sementara Islam menawarkan sistem berbasis spiritualitas, keadilan, dan keberlanjutan yang ditopang oleh *maqasid syariah*. Keduanya dapat saling melengkapi untuk memberikan perspektif baru dalam mengatasi tantangan ekonomi global.

References

- Annie Thériault. (2023, January 16). *Richest 1% Bag Nearly Twice As Much Wealth As The Rest Of The World Put Together Over The Past Two Years*. Oxfam Internasional.
- Arfah, A., & Arif, M. (2022). Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. *Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam*, 5(2).
- Azizah, N., Erwina, I., & Sidra, S. (1970). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Masalah Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis. *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i1.19952>
- Baihaqi, I. (2024). Zakat Sebagai Pilar Utama Pemaknaan Keadilan Sosial. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 171–182. <https://doi.org/10.24090/ej.v12i2.10558>
- Brabec, M. (2016). Recognition of Laborers as Citizens: First Worker Democracy versus Liberal Capitalist Democracy. *Perspectives on Global Development and Technology*, 15(1–2). <https://doi.org/10.1163/15691497-12341381>
- Ellen Meiksins Wood. (1981, June). *The Separation of the Economic and the Political in Capitalism*. <https://newleftreview.org/issues/i127/articles/ellen-meiksins-wood-the-separation-of-the-economic-and-the-political-in-capitalism>
- Fadillah, M. I., Supriatono Purnomo, B., & Purnamasari, I. (2024). *Islamic Economic Principles: A Critical Review of Capitalism and a Vision for Justice*. 12(02). <https://doi.org/10.33019/equity.v%vi%i.381>
- Fasya, G. (2021). Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2). <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v1i2.91>
- HS, S. (2019). Konstelasi Ekonomi Islam Peluang Dan Tantangan Di Era Globalisasi. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2(1–2). <https://doi.org/10.47313/jkik.v2i1-2.488>
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522>
- Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *PLoS ONE*, 17(9 September). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275113>
- Özek, A. U. (2025). Kur'ân'daki Zekât-Faiz Karşılaştırmasının İktisadi Açidan Değerlendirilmesi. *İslam Ekonomisi Dergisi*, 5(1), 49–68. <https://doi.org/10.55237/jie.1573509>

- Robinson, W. I. (2007). The pitfalls of realist analysis of global capitalism: A critique of Ellen Meiksins Wood's empire of capital. *Historical Materialism*, 15(3), 71–93. <https://doi.org/10.1163/156920607X225889>
- Saechu, M. S., & Syifa, F. M. (2024). Efektifitas Zakat Dalam Mengembangkan Perekonomian Umat Dan Pengaruh Riba Terhadap Stabilitas Ekonomi Makro Di Indonesia. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(01), 1–11. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i01.72>